

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika, 2009.

Eugenia Liliawati Muljono, *Tanya-Jawab BEA METERAI*, Jakarta. Harvarindo, 1999.

Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta. Paradigma, 2008.

Taryana Soenandar, *Prinsip-Prinsip Unidroit Sebagai Sumber Hukum Kontrak Dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional*, Jakarta. Sinar Grafika, 2004.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001.

Amiruddin dan Zaina Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta. PT.Raja Grafindo Persada, 2004.

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.

Dosminikus Rato, *Filasafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, PT Presindo, Yogyakarta, 2010.

Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 1999.

Heru Supriyanto, *Cara Menghitung PBB, BPHTB DAN BEA METERAI Edisi Kedua*, Jakarta Barat. PT Indeks, 2010.

Lichoen Tedjosiswojo, *Bea Meterai Berdasarkan UU No 13 TH. 1985*, Bandung. Alumni, 1988.

Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata tertulis (BW)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2001.

Billy Ivan Tansuria, *Bea Meterai Pajak Atas Dokumen Di Indonesia*, Yogyakarta. Graha Ilmu, 2013.

Tutik Triwulan Titik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Jakarta. Prestasi Pustaka, 2006.

Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi 2011*, Yogyakarta: Andi, 2011.

Teguh Samudera, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*, Bandung. Alumni, 2004.

Soemitro Rochmat, *Pajak Ditinjau Dari Segi Hukum*, Bandung. Eresco, 1991.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985
Tentang Bea Meterai.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun
2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan

Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang
Dikenakan Bea Meterai

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 476/KMK.03/2002
tentang Pelunasan Bea Meterai Dengan Cara
Permeteraian Kemudian.

C. Jurnal

K. Kusdi Wartanaya, *Kekuatan Yuridis Meterai Dalam Surat Perjanjian*, NA Martana- Kertha Semaya 2013-
ojs.unud.ac.id. diakses 23/03/2019.

Nurhadi, < mengapa - bukti – surat - di – muka – pengadilan -
harus-bermeterai-oleh-nurhadi-2612.html.>diaksesdari
<http://www.badilag.net/artikel/13812> pada [23/03/2019]

Diakses dari <https://www.sudut.hukum.com> / 2017 / 04 /
pengertian – tinjauan - yuridis.html pada tanggal 23
Maret 2019 pukul 20.46

Diakses dari <http://rumahkreasihana.blogspot.com/> 2012/ 10/
pengertian – definisi – contoh – surat - perjanjian.html
pada tanggal 23 Maret 2019 pada pukul 21.07

D. Internet

Diakses dari <https://www.online-pajak.com> / fungsi - materai pada tanggal 23 Maret 2019 pada pukul 20.53

Diakses dari <http://www.pengertianmenurutparaahli.com/> pengertian - asas-kepastian-hukum / pada tanggal 23 Maret 2019 pada pukul 20.59

<https://dosenekonomi.com/ilmu-ekonomi/> / perpajakan / dasar-hukum - bea - materai diakses pada tanggal 03 april 2019 pukul 00.57

https://www.kompasiana.com/jefri_harefa/552a5186f17e61507ad623e6/mendekonstruksi-pemahaman-nilai-dasar-hukumgustav-radbruch

<https://www.fsps.or.id/2016/01/fungsi-kepastian-hukum.html>

<http://artonang.blogspot.com/2016/06/fungsi-kepastian-hukum.html> Yance Arizona. Apa Itu Kepastian Hukum. <http://yancearizona.net/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum/> / diakses 21/05/14.

<http://www.sarjanaku.com/2011/08/pengertian-perjanjian-hukum-syarat.html>